

Kota Magelang Semangat Jadi 'Kota Sehat'



KR-Thoha

Penandatanganan berita acara 'Kota Sehat'.

MAGELANG (KR) - Komitmen dari banyak pihak, baik Pemerintahan, Walikota, Wakil walikota, Sekretaris Daerahnya dengan stakeholdernya yang ada, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun lainnya perlu penegasan lagi mengenai 'Kota Sehat'. "Termasuk nanti masalah pariwisata harus sehat, pendidikannya harus sehat, lalu lintasnya juga harus sehat," kata Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan Kota Sehat di Kota Magelang yang dilaksanakan di Ruang Adipura Kencana kompleks Kantor Walikota Magelang, Senin (18/3). Walikota Magelang juga menambahkan nantinya Forkopimda Kota Magelang juga akan diajak, sehingga benar-benar di Kota Magelang tercipta Kota Sehat. Kota Sehat itu, kata Walikota Magelang, diantaranya lingkungannya sehat, orangnya sehat, perilakunya sehat, termasuk industrinya sehat, wisatanya juga sehat. Dikatakan, ada 9 tatanan dengan 150 indikator Kota Sehat. "Kita sekarang harus benar-benar mendalami itu," tambahnya.

Di forum rapat koordinasi, juga dilaksanakan penandatanganan berita acara rapat koordinasi Kota Sehat. Di forum ini Walikota Magelang diantaranya mengatakan Kota Magelang sebenarnya sudah masuk sebagai Kota Sehat. Hanya saja perlu untuk didalami, dan benar-benar fokus. Walikota Magelang merasa yakin, hal itu bisa direalisasikan. Juga diinginkan Kota Magelang merupakan kota yang komplit, termasuk nantinya Kota Lansia, Kota Layak Anak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang dr Istikomah mengatakan visi Kota Magelang adalah "Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia". Untuk sehat sebenarnya bisa diwujudkan dengan rekognisi berupa menjadi yang terbaik sebagai Kota Sehat. Hanya saja saat ini prosesnya penilaian yang setiap 2 tahun sekali semenjak tahun 2005 untuk Kota Magelang belum pernah berproses menjalani verifikasi atau penilaian Kota Sehat. (Tha)-f

Arsip Bisa Menjelaskan Masa Lalu

SALATIGA (KR) - Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, Yaspri Khasani menegaskan keberadaan arsip sangat diperlukan untuk mendukung kelengkapan informasi yang disampaikan agar akurat dan detail. Penegasan ini dikemukakan Yaspri dalam Sosialisasi Kearsipan Mengenai Program Kerja Pengawasan Kearsipan 2024, di Taman Literasi Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dipersip) Kota Salatiga, Selasa (19/3). Menurutnya, keberadaan sebuah arsip merupakan hal yang penting karena akan menjadi pusat informasi ketika ada permasalahan yang muncul atau untuk keterbukaan informasi. iArsip adalah hal yang penting, bisa menjelaskan masa lalu dengan baik. Ketika arsip lengkap maka bisa menggambarkan masa lalu dengan sangat detail, baik dan akurat, tandas Yaspri.

Ia juga mengingatkan ketika arsipnya tidak baik, maka informasi yang diberikan ke stakeholder dan semua pihak akhirnya tidak akurat, sehingga pasti ada kelemahannya yang bisa menimbulkan permasalahan. Pengawasan arsip harus terus dilakukan supaya data terdokumentasi dengan baik dimana yang dulu manual sekarang sudah melangkah ke digital. Kepala Dipersip Salatiga, Sarwanti mengatakan masih ada beberapa OPD yang pengelolaan arsipnya harus ditingkatkan lagi kualitasnya. "Ada beberapa OPD di Salatiga yang sudah baik tetapi perlu ditingkatkan lagi," katanya. (Sus)-f

Pertumbuhan Ekonomi Klaten 2023 Sebesar 5,7 Persen

KLATEN (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda, penyampaian penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Klaten tahun 2023, bertempat di ruang paripurna pada senin (18/3). Rapat dipimpin Ketua DPRD Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Ketua Haryanto serta Marjuki. Rapat juga dihadiri Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya.

Ketua DPRD Klaten mengemukakan penyampaian tersebut masih tahap awal, berupa sambutan pembukaan oleh bupati secara makro. Secara detail akan disampaikan dengan soft file dan hard file, selanjutnya akan dibedah oleh DPRD melalui mekanisme workshop. Workshop akan dilakukan bekerja sama dengan perguruan tinggi. "Seperti biasa kami melakukan fungsi DPRD. Setelah APBD dilaksanakan harus diawasi. Setelah kami kaji bersama akademisi, akan kami berikan catatan-catatan strategis untuk digunakan eksekutif dalam menyusun APBD tahun berikutnya, atau 2024. Kemarin apa saja capaian-capaian yang sudah baik, lalu apa saja yang kurang nanti akan kami berikan masukan agar APBD 2024 lebih baik lagi," kata Hamenang.

Hamenang menilai, dari angka-angka makro yang disampaikan bupati, gambaran secara makro APBD Klaten 2023 sudah cukup bagus. Terbukti diantaranya ada berbagai penghargaan yang diraih Kabupaten Klaten. Artinya program-program Kabupaten Klaten mendapat apresiasi. "Terakhir Silpa, bisa bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif. Untuk itu DPRD masih akan mengkaji silpa tersebut apakah karena adanya efisiensi atau karena hal lain. Jika karena efisiensi berarti kita patut apresiasi," tambah Hamenang. (Sit)-f



KR-Sri Warsiti

Bupati dan Wakil Bupati Klaten menyerahkan laporan kepada Ketua DPRD.

SUARA PDIP WONOGIRI NAIK

Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Turun

WONOGIRI (KR) --Ketua DPC PDIP Wonogiri yang juga Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengungkapkan partainya dipastikan meraih 27 kursi dari 50 kursi DPRD setempat dalam Pemilu 2024 ini. Angka itu turun atau berkurang satu kursi jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 lalu dimana saat itu PDIP mampu menduduki sebanyak 28 kursi.

"Kendati perolehan kursi DPRD kabupaten turun, tetapi perolehan suara partai naik yakni bertambah 50 ribu suara sehingga total meraih 330 ribu suara," ungkap Joko di

kantornya, Senin (18/3). Pihaknya akan melakukan evaluasi mengenai penurunan jumlah kursi DPRD Kabupaten Wonogiri.

"Akan kami evaluasi apa yang membuat penurunan kursi. Target kami selama ini kan lebih baik (dari pada 2019), kenyataannya ini target meleset," ujarnya.

Ditanya siapa-siapanya caleg jadi 27 kursi itu pria yang akrab disapa Jekek belum bersedia merilisnya. Pihaknya menunggu hasil pleno dan penetapan dari KPU RI terlebih dahulu.

"Kami sudah rapat dengan pe-



KR-Djoko Santoso HP

Joko Sutopo

ngurus PAC dan Caleg. Saya yakin teman-teman juga melakukan penghitungan sendiri. Tapi DPC belum merilis siapa saja yang jadi dan yang gagal. Ini lebih mempertimbangkan psikologis teman-teman, menjaga suasana kebatinan mereka," tutur Ketua PDI-Perjuangan Wonogiri.

Dijelaskan Jekek, jumlah suara yang diperoleh PDIP Wonogiri untuk DPRD kabupaten tersebut mencapai 330.000 suara. Adapun untuk DPRD Provinsi Jateng mencapai 317.000 suara dan DPR RI meraih 301.000 suara. (Dsh)-f

Sembilan Daerah Berstatus Tanggap Darurat Bencana

SEMARANG (KR) - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengungkapkan, di Jawa Tengah terdapat sembilan kabupaten/kota berstatus tanggap darurat bencana banjir. Untuk itu masyarakat di Sembilan daerah tersebut diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.

Nana Sudjana mengungkapkan hal ini kepada wartawan di Semarang Senin (18/3), usai Rapat Koordinasi Kebencanaan Tingkat Jawa Tengah Tahun 2024 di kantor Gubernur. Kesembilan daerah yang berstatus tanggap darurat bencana tersebut meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kendal, Kota Semarang, Demak, Kudus, Pati, Jepara, dan Grobogan.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), cuaca ekstrem masih memungkinkan terjadi hingga 20 Maret 2024 mendatang. Setelah itu, baru mengalami tren penurunan curah hujan. Adapun masa peralihan (pancaroba) baru pada April-Mei.

Nana Sudjana mengatakan, Jawa Tengah merupakan daerah yang rawan bencana. Sejak Januari hingga 14 Maret 2024, APBD Jateng telah mencatat se-

banyak 134 kejadian bencana, yang meliputi 61 angin kencang, 53 banjir, 18 tanah longsor, dan 2 kebakaran permukiman/gedung. Atas rentetan bencana itu, menyebabkan 226.601 jiwa terdampak, 36.086 jiwa mengungsi, dan 15 korban meninggal dunia.

Dalam kurun waktu 1 minggu terakhir (8-14 Maret 2024) telah terjadi sebanyak 30 di kejadian bencana besar di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

Pada kurun waktu tersebut tercatat sebanyak 14 kejadian banjir dan 16 kejadian angin kencang yang tersebar di 20 Kabupaten/Kota. Kejadian banjir yang menonjol meliputi Kota Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan.

Menurut Nana, cuaca ekstrem akhir-akhir ini telah mengakibatkan meningkatnya kejadian bencana secara signifikan. Dalam pe-

nanggulangan bencana, Pemprov Jateng telah menerbitkan beberapa regulasi, memberikan dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Selain itu juga menggandeng stakeholder terkait untuk memberikan bantuan dalam bentuk dukungan personal, peralatan, maupun logistik.

"Menghadapi bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah, pemerintah di kabupaten/kota dan Pemprov Jawa Tengah tidak mampu bekerja sendiri. Kami membutuhkan bantuan dari Pusat dan dari masyarakat," tutur Nana Sudjana.

BNPB juga sudah memberikan bantuan peningkatan alokasi anggaran, penguatan sumber daya, dukungan peralatan, penguatan infrastruktur, dan langkah-langkah pemulihan pasca bencana.

Sedangkan BMKG membantu terkait rekayasa cuaca dengan menggunakan teknologi modifikasi cuaca (TMC) agar curah hujan dapat dikendalikan. Langkah tersebut untuk meminimalisasi risiko terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

Nana Sudjana berharap kepada Bupati/Walikota agar melakukan upaya pencegahan dan mitigasi

bencana, penanganan darurat bencana serta perencanaan rehabilitasi bencana. Untuk itu kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus ditingkatkan. "Kami sudah menyiapkan untuk evakuasi. Posko kesehatan kami standby terus, dan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Tanggul-tanggul yang ada akan dievaluasi dan secara bertahap dan akan melakukan perbaikan," tutur Nana Sudjana.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, sembilan daerah di Jawa Tengah telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Sesuai instruksi Presiden, BNPB langsung memberikan bantuan dasar dari para penyintas bencana.

Bantuan yang diberikan meliputi peralatan penanggulangan bencana, dapur umum, maupun anggaran operasional untuk tanggap darurat. Setelah itu akan ada transisi tanggap darurat. Dalam status ini ada beberapa daerah yang harus merelokasi masyarakat terdampak.

"Setelah itu, ada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dan rumah warga yang rusak diperbaiki," tutur Suharyanto. (Bdi)-f

Temanggung Terima Tambahan Pasokan Elpiji

TEMANGGUNG (KR) - Pemerintah Kabupaten Temanggung memastikan adanya tambahan pasokan gas elpiji 3 kilogram selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024. Penambahan itu sebagai antisipasi kelangkaan pada masa itu yang terjadi peningkatan permintaan. Kepala Bagian Perekonomian, Setda Temanggung Fita Parma Dewi mengatakan tambahan pasokan pada Ramadhan merupakan bagian dari tambahan alokasi dalam satu tahun dari Pertamina.

"Tambahan alokasi dari Pertamina akan dikonsentrasikan pada waktu tertentu diantaranya di ramadhan dan idul Fitri," kata Fita Parma Dewi, Selasa (19/3). Fita mengemukakan pada 2023 Kabupaten Temanggung mendapat alokasi sebanyak 28.852 metrik ton (MT) atau 9.617.333 tabung gas elpiji bersubsidi. Sedangkan tahun 2024 ini mendapat alokasi sebanyak 29.625 MT,

atau 9.875.000 tabung.

"Ada tambahan di tahun 2024 ini, sebanyak 257.667 tabung. Tambahan itu diantaranya diambil di ramadhan dan lebaran," katanya. Dikatakan dengan tambahan tersebut pihaknya menjamin kebutuhan gas elpiji pada masyarakat dapat tercukupi.

Fitan mengatakan tambahan juga akan dialokasikan pada masa musim panen tembakau, atau sekitar Agustus, selain juga pada akhir tahun.

Fitan mengatakan hasil koordinasi pembek dengan PT Pertamina hasilnya dipastikan ketersediaan pasokan gas elpiji di Temanggung mencukupi. Sementara pada seluruh agen dan pangkalan untuk bisa menyalurkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Kami juga melakukan pengawasan terkait distribusi elpiji bersubsidi, sehingga tepat sasaran," katanya. (Osy)-f

Muhlisun Pergi Meninggalkan Rumah



KR-Istimewa

Muhlisun

TEMANGGUNG (KR) - Terhunting sejak Minggu, 7 Januari 2024, Muhlisun (50) warga Dusun Beji RT 012/RW 005 Desa Semen Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, pergi meninggalkan rumah, hingga kini belum kembali. Kepergian Muhlisun sama sekali tidak diketahui kelu-

arganya, semula hanya pergi biasa. Tetapi setelah sehari-hari Muhlisun tidak kembali, barulah keluarga melaporkan perihal tersebut ke Polsek Tembaran, Polres Temanggung. Hal tersebut dilakukan lantaran Muhlisun 'ikut' anaknya di Tanggilanom Selopampang Temanggung. Laporan kehilangan dilakukan pada 22 Februari 2024.

Salah satu keluarga korban, Nuryanti kepada KR, Senin (18/3) menjelaskan pada saat bepergian korban mengenakan jaket doreng hitam, topi hitam, celana hijau PDH TNI, mengenakan kaos hitam, memakai sandal jepit, dan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2023 Nopol AA 3489 RY. Nuryanti berharap kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan Muhlisun untuk segera menghubungi Polsek Tembaran (02934903400) atau Nuryanti (081226920462). (Hrd)-f

Pemkab Boyolali Serahkan LKPD ke BPK Jateng

BOYOLALI (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Penyerahan ini dilakukan di Ruang Penjalin Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng di Kota Semarang pada Senin (18/3).

Wakil Bupati (Wabup) Boyolali hadir secara langsung didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali, Gatot Murdiyanto dan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali, Purwanto. Selain Pemkab Boyolali, agenda juga turut dihadiri Pemkab Banjarnegara dan Pemkab Tegal.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho mengucapkan terima kasih kepada ketiga Pemkab yang telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan dan menyerahkan ke BPK Per-

wakil Provinsi Jateng. Dalam pemeriksaan atas LKPD, terdapat empat kriteria penilaian yang dijadikan dasar dalam penetapan opini.

Keempat kriteria tersebut adalah kesesuaian dengan standar, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, implementasi sistem pengendalian intern, dan kecukupan pengungkapan informasi pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

"Artinya laporan keuangan itu sesuai dengan standar akuntansi pemerintah jadi cara penyusunannya, cara menyajikannya apakah sesuai standar atau belum," ujarnya. Usai menerima LKPD, BPK Perwakilan Provinsi Jateng akan melakukan pemeriksaan dan memberikan opini atas LKPD tersebut.

"Setelah penyampaian unaudit ini kami akan mengadakan pemeriksaan dalam jangka dua bulan dan kami harapkan kelengkapan dokumen bisa segera dapat disampaikan ke tim sehingga kami bisa lebih cepat menyelesaikan pemeriksaan dan tidak terjadi hal hal yang tidak

diinginkan," ungkapnya.

Terdapat empat opini yang akan dikeluarkan oleh BPK atas LKPD yang diterima. Keempat opini tersebut yakni wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak

menyatakan pendapat. Dari keempat opini tersebut, Pemkab Boyolali mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 12 kali berturut-turut dari BPK atas LKPD yang dilaporkan. (Mul)-f



KR-Mulyawan

Wakil Bupati Boyolali Wahyu Irawan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Unaudited Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jateng.